

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
PADA KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
DAN KONSERVASI KOTA SEMARANG**

Oleh:
Diyana Valentina Putri Sarani, Ida Hayu Dwimawanti, Zainal Hidayat *)

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id
Email: diyanvalentina@rocketmail.com

ABSTRACT

The implementation of policies on the management of coastal in the area of general used and conservation at semarang is planning coordination, utilization, monitoring, and control of coastal resources of the Government and Local Government, between sectors, between terrestrial and marine ecosystems, as well as between science and management to improve the welfare of the people. The purpose of this research is to analyze Policy For Coastal Management Policy Implementation in the region common Utilization and Conservation Semarang with 5 indicators that can be used to assess the quality of policy output, namely Access, Coverage, Frequency, Service Delivery and Accountability.

Researchers analyzed factors that support and hinder the implementation of coastal zone management policy with 4 factors was found in the field. 4 factors are environmental, Technology, program plan and Socio economic Conditions.

The results of this research is that the implementation of policies on the management of coastal in the area of general used and conservation at semarang is good enough but still not optimal, because there are 3 indicators are encountering many obstacles for the Implementation. Still need for improvement in indicators Access, Coverage and Frequency.

Keywords: The implementation of policies, Management of Coastal, general Utilization and Conservation Areas.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang adalah Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, Kota Semarang terletak antara 06°50'-07°10" LS dan 109°35"-110°50' BT dengan ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 dpl. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 km², yang terdiri dari 39,56 km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 di jelaskan bahwa kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi :

1. Pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional.
2. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan, dan
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana secara umum.

Data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang, diketahui bahwa Kota Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah mempunyai panjang pantai 36,63km yang terbentang dari Kecamatan Tugu sampai Kecamatan Genuk, luas perairan 100,48km luas wilayah 91,11km. Kota Semarang memiliki ekosistem mangrove seluas 84,47 ha yang berada di wilayah Kecamatan Tugu dan Kecamatan Genuk. Nelayan kota Semarang sebagian sebesar bersekala kecil dengan perahu atau kapal motor dibawah 10 GT, sehingga jangkauan melautnya hanya diwilayah pantai sejauh 4 mil, perahu yang ada semuanya perahu dengan motor temple

dibawah 10 GT. (*Dikutip dari Renstra Wilayah Pesisir Kota Semarang, 2011*)

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan permasalahan mengenai Zonasi dalam kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi. Telah jelas disebutkan dalam Rencana Peraturan Daerah bab V, Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir, Pasal 21 Rencana pola ruang wilayah pesisir Kota Semarang meliputi penetapan :

- (a) Kawasan Pemanfaatan Umum
- (b) Kawasan Konservasi.
- (c) Alur laut.

Pasal 21 Ayat (2) Rencana pola ruang wilayah pesisir Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan arahan pembangunan. Ayat (3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Perikanan budidaya
Merupakan area budidaya perikanan tambak yang ada di pesisir Kota Semarang.
 - b. Zona Perikanan tangkap
Merupakan area penangkapan ikan di laut yang diperbolehkan bagi nelayan Kota Semarang, dengan titik Koordinat sebagai berikut:
 - c. Zona Pariwisata
Merupakan area wisata di perairan (tepi laut) Kota

Semarang dengan titik koordinat sebagai berikut :

- d. Zona Industri
Merupakan area sentra – sentra industry, baik industry rumah tangga, kecil dan menengah yang ada di pesisir Kota Semarang, yang kawasannya telah diatur dalam RTRW.
- e. Zona Pelabuhan
Merupakan daerah lingkungan kepentingan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana induk pelabuhan dengan titik koordinat sebagai berikut :
- f. Zona Pertanian
Merupakan area pertanian di pesisir Kota Semarang, yang kawasannya mengacu pada RTRW
- g. Zona Pemukiman
Merupakan area permukiman penduduk pesisir Kota Semarang, yang kawasannya mengacu pada RTRW.
- h. Zona Pelayaran
Zona pelayaran yang dimaksud adalah alur – alur pelayaran kapal penumpang dan kapal barang / niaga pada titik koordinat sebagai berikut :

(2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW Kota Semarang, terdiri dari :

- a. Zona Konservasi wilayah pesisir
- b. Zona sempadan pantai
- c. Zona mitigasi bencana.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang

2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang

C. Teori

C.1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dey Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. (dalam Riant Nugroho, 2006: 23) Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

C.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang., dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (dalam Winarno (2012:148), Randall B.Ripley dan Grace A.Franklin, istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

C.3 Indikator Policy Output

Menurut cf.Ripley dalam Purwanto & Sulistyastuti (2012:106-110), berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut:

1. Akses, indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran, orang-orang yang

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut

2. Cakupan, indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.
3. Frekuensi, merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.
4. *Service delivery* atau ketepatan layanan, indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.
5. Akuntabilitas, indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

D. Metode Penelitian

D.1 Design Penelitian

Dari Desain penelitian yang ada di atas, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Dalam hal ini jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai gejala yang ada. Design penelitian deskriptif dalam hal ini mempermudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang,

dengan upaya yang diharapkan dapat meningkatkan wujud pembangunan perekonomian masyarakat pesisir Kota Semarang.

D.2 Situs Penelitian

Situs Penelitian ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang dengan melakukan studi lapangan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

D.3 Subyek Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini, Subyek merupakan pegawai yang masih menjabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang yakni,

1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang
2. Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir Dinas kelautan dan perikanan Kota Semarang
3. Nelayan dan masyarakat pesisir di daerah Kecamatan Genuk Kelurahan Trimulyo Kota Semarang.

D.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data Primer dan Sekunder

D.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dengan melakukan wawancara dan observasi.

D.6 Analisa dan Intepretasi data

Dalam Penelitian ini menggunakan Analisa domain sebagai upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian dengan tahapan tahap yakni, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

D.7 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini menggunakan metode Triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan wilayah pesisir pada kawasan pemanfaatan umum dan konservasi Kota Semarang yang dapat dilihat melalui :

1. Berdasarkan hasil Penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang pada Indikator akses masih menemui Kendala di lapangan. Berdasarkan hasil uraian atas indikator akses masih ditemukan kendala dalam bidang Kemudahan Masyarakat dalam mengakses program kebijakan yang ada. Pemerintah yang belum melibatkan masyarakat secara penuh menyebabkan informasi yang menjadi hak masyarakat pesisir sebagai target kebijakan belum dapat secara mudah.
2. Berdasarkan hasil Penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang pada Indikator Cakupan masih menemui kendala di lapangan. Pada target kebijakan dan heterogenitas masyarakat pesisir masih mempunyai permasalahan dalam implementasinya. Pada target kebijakan belum sepenuhnya dapat mencakup masyarakat pesisir. Pemberian bantuan antara RW I dan RW II yang berada di dalam satu Kelurahan juga mengalami kendala.
3. Berdasarkan hasil Penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang pada Indikator Frekuensi masih menemui kendala di lapangan. Pemberian Bimbingan pada Eksploitasi, eksplorasi dan konservasi yang hanya dilakukan sekali pada awal program merupakan salah satu kendala ketika Implementasi program tersebut dilakukan. Tidak adanya bimbingan setelah program dilakukan menyebabkan kurang terkontrolnya masyarakat sebagai sasaran kebijakan. pada sosialisasi bantuan pemberian alat pengolahan pasca panen yang hanya diberikan satu kali pada saat program berlangsung menyebabkan kurang terkontrolnya program yang di implementasikan tersebut

4. Berdasarkan hasil Penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang pada Indikator Ketepatan Waktu sudah berjalan dengan baik. Upaya yang ditunjukkan pemerintah terhadap ketepatan pada program kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan proposal pengajuan bantuan., selain tepat sasaran, efisiensi waktu juga sangat diperlukan dalam hal ini.
5. Berdasarkan hasil Penelitian pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang pada Indikator Akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan di awal program dengan masyarakat dan *stakeholder* yang berperan di dalamnya sebagai upaya agar kebijakan tepat sasaran. Monitoring yang dilakukan tiga bulan sekali sebagai upaya *preventive* terhadap program kebijakan yang berjalan apakah menemui kendala

dan sebagai upaya *controlling* pada program kebijakan yang sedang berjalan. Evaluasi yang dilakukan di akhir program kebijakan sebagai sikap pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.

1. Faktor Internal dan Eksternal Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang, merupakan faktor – Faktor yang mendukung dan Menghambat proses Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang yaitu Faktor Lingkungan, Teknologi, Komunikasi dan Sosio Ekonomi. Faktor – faktor tersebut di kelompokkan ke dalam faktor Internal dan Faktor Eksternal yang menghambat maupun mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Konservasi Kota Semarang. Faktor Internal yang meliputi faktor Lingkungan yaitu pada criteria Pencemaran Lingkungan. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi, yang meliputi kriteria Aspek Ekologi, Aspek Ekonomi, Pengembangan Masyarakat Berbasis Keunggulan Lokal, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Sedangkan pada faktor Eksternal terdiri dari Faktor Lingkungan terdiri dari penetapan Zonasi, dan Revitalisasi Kawasan konservasi. Faktor Teknologi, yang meliputi criteria Teknologi Terbarukan, Teknologi Pasca Panen, Teknologi Zona Perikanan Tangkap. Faktor Perencanaan Program.

A. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berada dalam lingkungan pada Penelitian. Di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam Faktor Internal adalah pada Kondisi Sosio Ekonomi yang meliputi aspek Ekologi, Aspek Ekonomi dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis keunggulan lokal.

1. Kondisi Sosio Ekonomi

a. Aspek Ekologi

Aspek Ekologi menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang karena Aspek Ekologi Sosial menjadi aspek dalam faktor Sosio Ekonomi ini. Pengelolaan ekologi yang kurang baik karena masih banyaknya rob dan banjir serta kerusakan ekosistem lainnya yang secara langsung berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

b. Aspek Ekonomi

Aspek Ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung pada Implementasi Pengelolaan wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan juga konservasi Kota Semarang karena pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang berupaya dengan sebaik mungkin mulai dari perbaikan sarana dan prasarana, pemberian bantuan dalam bidang perikanan budidaya, teknologi, perbaikan infrastruktur dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat pesisir Kota Semarang.

c. Pengembangan Masyarakat berbasis keunggulan lokal

Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis keunggulan Lokal sebagai faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan

Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang menjadi Sebuah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menggali potensi yang dimiliki masing – masing wilayah pesisir Kota Semarang dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Ecoeduwisata yang didasarkan pada konservasi mangrove, pemanfaatan hasil perikanan Tangkap dan pengolahan Biji Mangrove merupakan salah satu cara upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing – masing wilayah Pesisir Kota Semarang.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berada di luar lingkungan pada Penelitian. Di dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam Faktor Eksternal adalah pada Faktor Lingkungan yang meliputi Perencanaan Zonasi, Pencemaran Lingkungan dan Revitalisasi kawasan Konservasi. pada faktor Teknologi yang meliputi Teknologi terbaru dan teknologi Pasca Panen serta pada Perencanaan Program.

a. Lingkungan

Karakteristik Lingkungan mempunyai beberapa komponen didalamnya yang dapat mempengaruhi maupun mendukung bagaimana proses Implementasi itu dapat berjalan atau tidak, dalam hal ini terkait dengan Lingkungan Eksternal kondisi Masyarakat Pesisir.

1. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang Pencemaran lingkungan yang dengan adanya wilayah konservasi di daerah Pesisir yang diharapkan dapat meminimalisir dampak terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan

lainnya. Apabila terjadi pelanggaran dalam pencemaran lingkungan dengan limbah industri, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang langsung terjun ke lapangan dengan meninjau lokasi pencemaran. Penyelesaian secara instansi dan juga hukum di tempuh dalam upaya penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan ini.

2. Penetapan Zonasi

Penetapan Zonasi sebagai faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang karena Penetapan Rencana zonasi yang masuk kedalam faktor lingkungan karena masih tersendat dengan adanya perda zonasi yang masih belum di sahkan. Hanya beberapa yang sudah ditetapkan keberadaannya. Seperti Zona Industri yang hanya memberikan akses masyarakat untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan pencemaran lingkungan dan zona perikanan budaya yang suah di Implementasian dengan memberikan bantuan benih yang sesuai dengan kondisi wilayah pesisir Masyarakat Pesisir.

3. Revitalisasi Kawasan Konservasi

Revitalisasi Kawasan konservasi sebagai faktor pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang Karena Konservasi yang dilakukan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan sudah berjalan dengan baik. Sejak adanya abrasi besar – besar pada tahun 1999, pemerintah melakukan tindakan penanaman mangrove sebagai daya dukung wilayah konservasi untuk meminimalisir terjadinya dampak kerugian pada permasalahan abrasi.

b. Teknologi

Unsur Ketersediaan Teknologi yang diharapkan pada implementasi kebijakan menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan wilayah pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Konservasi Kota Semarang.

1. Teknologi Terbaru

Teknologi Terbaru menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang karena Teknologi terbaru cukup menunjang karena teknologi tersebut lebih memudahkan masyarakat dalam usaha penangkapan ikan. Namun dalam implementasi yang dilapangan beberapa alat tangkap yang kurang tepat dalam implementasinya menyebabkan pemerintah harus meninjau kembali apakah teknologi tersebut sudah tepat apabila di implementasikan untuk nelayan tambak. Karena selama ini kurangnya koordinasi dengan masyarakat dengan teknologi apa yang dibutuhkan masyarakat menyebabkan pemerintah harus mengkaji ulang bantuan untuk sasaran kebijakan.

2. Teknologi Pasca Panen

Teknologi Pasca Panen sebagai faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang karena bagaimana mengolah hasil tangkapan agar memiliki nilai jual lebih tinggi sudah disosialisasikan ke masyarakat. Pada awal pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik, namun setelah tiga bulan berjalan masih antusias masyarakat mulai menurun menggunakan teknologi pasca panen tersebut.

c. Perencanaan Program

Perencanaan Program melalui komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi. Perencanaan Program sebagai faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang melalui serangkaian koordinasi dengan melakukan penyuluhan di lapangan bagaimana kondisi masyarakat dan program apa saja yang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada Indikator Akses, Cakupan dan Frekuensi masih menemui kendala dalam Implementasinya. Akses masih menemui kendala pada masyarakat yang belum dilibatkan sepenuhnya dalam Formulasi Kebijakan. Cakupan, pemerintah belum sepenuhnya dapat mencakup semua masyarakat pesisir Kota Semarang. Frekuensi pada Bimbingan Eksporasi, Eksploitasi dan Rehabilitasi hanya dilakukan satu kali pada saat Implementasi Program.. Sedangkan pada Indikator Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas sudah dapat berjalan dengan baik. Ketepatan Waktu melibatkan masyarakat dalam proses Implementasi bantuan perikanan tangkap dan rehabilitasi. Akuntabilitas, Perencanaan yang dilakukan di awal dan evaluasi yang di laksanakan di akhir program .

1. Faktor yang mendukung

a. Pada Faktor Eksternal :

Lingkungan pada kriteria Revitalisasi Kawasan konservasi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Teknologi Pasca Panen memudahkan masyarakat dalam pengolahan hasil tangkap. Perencanaan Program yang melibatkan masyarakat dan *stakeholder*.

b. Pada Faktor Internal :

Kondisi Sosio Ekonomi pada kriteria Aspek Ekonomi menjadi faktor pendukung karena pemerintah ber[aya semaksimal mungkin dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis keunggulan local menjadi faktor pendukung dengan masing – masing wilayah, Tugu dan Trimulyo dengan mangrove yang dikembangkan dan direncanakan sebagai ecoeduwisata

2. Faktor yang menghambat

a. Faktor Eksternal :

Lingkungan pada kriteria Pencemaran Lingkungan berdampak pada lingkungan masyarakat pesisir pada kriteria Penetapan Zonasi terkendala perda zonasi sampai saat ini belum disahkan. Teknologi Terbarukan ini tidak tepat sasaran dalam implementasinya.

a. Faktor Internal :

Sosio Ekonomi pada aspek Ekologi pada Pengelolaan ekologi yang kurang berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan rekomendasi antara lain :

1. Pada Akses yang mengalami kendala di lapangan, dengan adanya perencanaan program yang ada Pemerintah melibatkan masyarakat secara penuh agar tidak terjadi *miss communication* pada perencanaan program antara masyarakat satu dengan yang lain. Cakupan terkait bantuan yang ada harus dapat di data ulang agar bantuan yang didapat masyarakat dapat dirasakan secara merata. Peningkatan Intensitas pelayanan program yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan minimal satu bulan sekali untuk melihat perkembangan program yang di Implementasikan.
2. Mempercepat pengesahan Zonasi kawasan Pesisir Kota Semarang karena dalam Implementasinya masih banyak terkendala masalah pengesahan Zonasi. ;Melakukan Teknologi Terbarukan yang tepat sasaran dengan melihat kondisi nelayan di masing – masing daerah. ;Pengawasan Terhadap Lahan Mangrove setidaknya satu bulan sekali untuk melihat perkembangan lahan konservasi di lapangan.
3. Pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Konservasi Kota Semarang terkait dengan Ketepatan waktu layanan dan Akuntabilitas sudah berjalan dengan baik dengan menguatkan controlling pada setiap program dan memberikan layanan kebijakan sehingga permasalahan dilapangan dapat terselesaikan. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian masyarakat pesisir dengan program pemberdayaan masyarakat secara

kreatif dan berkelanjutan. Mempertahankan kegiatan rutin penanaman mangrove sebagai upaya revitalisasi dan pencegahan abrasi pantai.

Daftar Pustaka

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006.

Purwanto dan Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik*:Gava Media.Jogjakarta.2012

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2004.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2011-2015.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil